



SM/Hari Santoso

Teguh Yuwono:

Pengganti Setnov Perlu Perbaiki Citra DPR

Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri dari parlemen. Apakah konfigurasi politik di parlemen bakal berubah? Bagaimana pula implikasinya terhadap atmosfer politik di luar parlemen, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun depan? Berikut perbincangan wawancara *Suara Merdeka* Hari Santoso dengan pengamat politik sekaligus ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, **Dr Teguh Yuwono MA.**

Apakah pengganti Setya Novanto harus dari Partai Golkar? Kenapa?

Konsensus politik antara partai-partai di parlemen menempatkan kader Golkar ke pucuk pimpinan DPR periode 2014-2019. Kita tengok kembali dinamika di Senayan tiga tahun lalu. Kala itu, anggota dewan tarik-ulur kepentingan untuk bisa menempatkan pihak yang paling berhak menduduki kursi pemimpin legislatif. Masih juga segar dalam ingatan bersama, muncul kekuatan besar Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). KIH merepresentasikan kekuatan PDIP sebagai partai pemenang pemilu, yang didukung kawan seperjuangan memperebutkan kursi presiden hingga merembet ke parlemen. Sebut saja PKB, Nasdem, dan Hanura. Mereka berhadapan dengan KMP, yang mencerminkan kekuatan Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, bahkan PKS.

Kendati sukses mengantar Joko Widodo di kursi kepresidenan, tak demikian di parlemen. Pertarungan partai-partai di Senayan itu diakhiri kemenangan poros KMP, karena jumlah kursi anggota parlemen dalam

kongsi itu mencapai 52 persen. KMP pun sepakat menjadikan kader Golkar sebagai perwakilan partai politik dengan perolehan suara besar, melenggang menjadi ketua DPR. Ya, semestinya sesuai dengan formula itu, Golkar masih akan tetap mendudukkan kadernya sebagai ketua DPR hingga akhir masa jabatan anggota parlemen 2019.

Bagaimana mekanisme pergantian tersebut?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur melalui tahapan rapat paripurna. Tentu setelah partai berlambang pohon beringin itu mengajukan nama pengganti Novanto. Siapa pun itu, kelak yang akan diakomodasi oleh wakil rakyat, pada forum tertinggi, rapat paripurna. Nah, kita tunggu siapa calon yang diajukan Golkar.

Kemarin, secara sepihak Setya Novanto juga sudah mengajukan Aziz Syamsudin sebagai pemimpin dewan. Namun faktanya nama itu menerima resistensi cukup besar dari sesama kader. Walhasil, justru Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang juga didukung kekuatan besar koalisi

di parlemen menduduki Pelaksana Tugas Ketua DPR.

Sampai kapan?

Tentu sampai Partai Golkar resmi mengajukan nama calon ketua DPR. Namun kenyataannya sejauh ini Golkar juga belum menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk menentukan kader yang dianggap paling kompeten. Benar diakui partai itu telah memiliki Pelaksana Tugas Ketua Umum Airlangga Hartarto, selepas jabatan ketua umum tidak lagi dipegang Novanto yang tersandung perkara megaproyek KTP elektronik. Bolehlah ditunggu dulu siapa yang akan diajukan Golkar nanti.

Apakah pergantian ketua DPR akan mengubah atmosfer di parlemen?

Kalau dalam konteks hubungan antarpolisi politik dan mitra koalisi sepertinya tidak akan muncul gejolak. Atmosfer yang muncul juga tetap akan sejuk, bahkan berkesan mendingin. Namun mungkin muncul eskalasi kepentingan pada tingkat individu di tubuh pemimpin DPR.

Penjelasannya?

Sejauh ini Setya Novanto memiliki kedekatan dengan

banyak pemimpin dewan. Salah satunya dengan wakil ketua DPR Fahri Hamzah, yang sebenarnya bisa digantikan figur lain. Namun karena kedekatannya dengan Setya Novanto, keinginan PKS menggantikan Fahri, yang bekas kader partai itu, seperti membentur tembok kukuh. Asal tahu saja, Setya Novanto berkesan enggan menggelar rapat paripurna DPR berkenaan dengan usaha menggantikan Fahri. Persoalannya, bagaimana sikap ketua baru DPR. Akankah dia memilih manuver serupa itu juga. Semua, masih harus kita tunggu.

Apa implikasinya terhadap fraksi partai itu di parlemen?

Hal serupa juga terjadi pada Fraksi Golkar. Tidak akan muncul persoalan berarti. Apalagi partai itu memang dikenal mempunyai banyak loyalis. Bahkan karena kompetensi para kader yang mumpuni dalam persoalan dunia politik, Partai Golkar acap dijuluki partai paling dewasa. Figur atau sosok tertentu tidak pernah menjadi masalah dalam estafet kepemimpinan ketua umum.

Bagaimana pula dengan percaturan politik di luar parlemen?

Politik dikenal sarat kepentingan. Percaturan politik di luar atau di dalam parlemen juga akan sangat dipengaruhi oleh dinamika di Senayan. Namun tentu kita harus tetap mendorong kepentingan itu berpihak pada rakyat. Pucuk pemimpin dewan yang baru pasti sudah mahfum persoalan ini. Tak kurang tentu ketua anyar DPR juga butuh mengembalikan kepercayaan atas kemerosotan kepercayaan publik. Citra parlemen perlu diperbaiki terus-menerus karena di dalamnya tercium aroma korupsi yang menyengat; bagi-bagi jatah anggaran negara dan sebagainya. Ketika ketua DPR kelak bekerja berlandaskan hal itu, saya melihat akan menjadi semacam angin sejuk dalam percaturan politik nasional secara luas.

Bagaimana pula kemungkinan interaksi parlemen di bawah pengganti Setya Novanto dengan lembaga kepresidenan?

Hubungan dua lembaga itu memang seyogianya harmonis. Terlebih melihat bagaimana Presiden Joko Widodo yang bisa mendekati diri dengan kalangan anggota parlemen. Dia bisa merangkul banyak pihak, meski dulu pernah menjadi

lawan politik saat pemilihan presiden. Saya juga masih optimistis siapa pun ketuanya masih akan bisa menjaga keharmonisan dengan lembaga kepresidenan.

Bagaimana pula kemungkinan dukungan bagi keberlanjutan Joko Widodo sebagai presiden, sebagaimana telah dinyatakan Partai Golkar sebelumnya?

Sepanjang ketua DPR masih berasal dari Partai Golkar, komitmen mendukung pemerintahan

Joko Widodo masih akan mengemuka. Golkar tetap akan bersikap realistis di tengah upaya untuk tidak makin terpuruk dan membuat blunder politik, pas-cakus Setya Novanto. Kendati dulu berseberangan sikap, sekarang sudah berada dalam bahtera yang sehaluan. Layar juga telah dikembangkan, misalnya, dengan tetap mendukung Jokowi menjadi petahana pada 2019. (44)

Dr Teguh Yuwono MA

Pendidikan

- S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang
- S-2 Public Policy and Administration Flinders University Australia
- S-3 Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung

Profesi

- Dosen Ilmu Pemerintah Undip

Jabatan

- Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Undip

Kiprah Internasional

- Pemantau internasional pemilihan presiden Amerika Serikat di Wyoming dan Colorado (2016)
- Dosen tamu di School of Global Area Studies University of Wyoming AS (2016)
- Pembicara konferensi internasional dan nasional bidang politik pemerintahan.

